

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Kinerja (LKj) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 telah berhasil disusun. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan khususnya Pusat Pelatihan SDM Kesehatan masih dihadapi tantangan kondisi pandemi COVID-19. Kondisi ini menuntut seluruh entitas untuk terus beradaptasi baik dari segi penyesuaian anggaran, perubahan metode pelaksanaan kegiatan sampai dengan kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan pelatihan SDM Kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi. Dari sisi perencanaan dan anggaran, tahun 2021 adalah tahun pertama dimulainya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), sehingga banyak upaya-upaya adaptasi yang harus dilakukan. Selain itu, di tahun kedua masa pandemi, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan secara kontinu terus berperan aktif dalam upaya pengembangan kompetensi tenaga kesehatan baik melalui pelatihan maupun *workshop* terkait penanggulangan COVID-19 serta melanjutkan proses terbentuknya *Corporate University* Kementerian Kesehatan.

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Selain itu, LKj ini juga diharapkan dapat menggambarkan secara utuh kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan selama tahun 2021 berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun.

LKj ini juga berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kewajiban Pusat Pelatihan SDM untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas pencapaian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam upaya penyempurnaan kinerja, dimana penyusunan laporan kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan tersusunnya LKj ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan pada tahun 2021 dan juga dapat digunakan untuk mengetahui pencapaian target indikator kinerja, realisasi anggaran serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya, kami mengharapkan LKj Pusat Pelatihan SDM Kesehatan 2021 ini dapat menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan tugas fungsi dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang lebih baik di masa yang akan datang, serta dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan khususnya terkait program dan kegiatan prioritas di masa yang akan datang.

Jakarta, 27 Januari 2022

Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan,



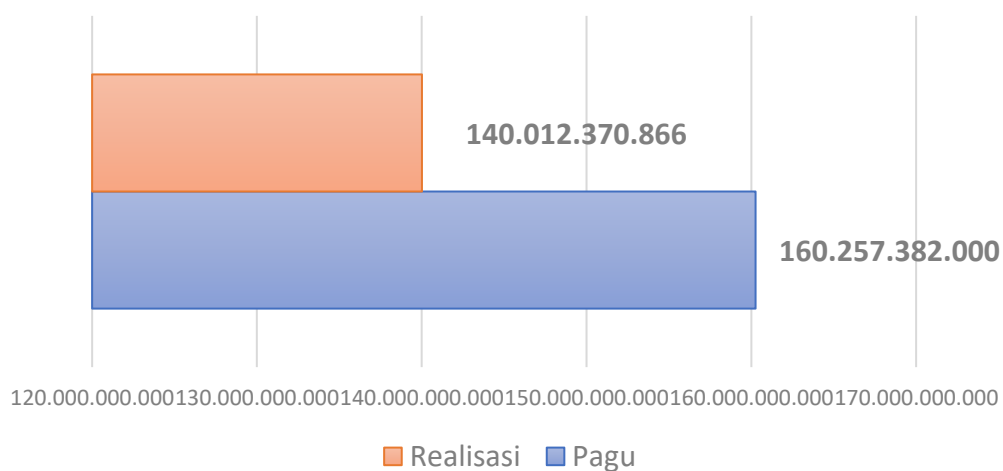
**Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes**

NIP 196504181989032002

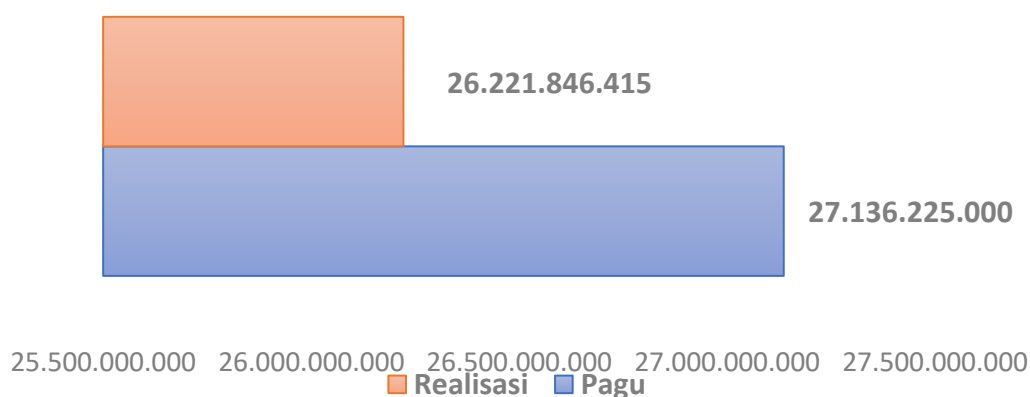
## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan Tahun 2021 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076) serta pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan selama tahun anggaran 2021. Pada tahun 2021, anggaran kegiatan pelatihan SDM Kesehatan (2076) sebesar **Rp. 160.257.382.000** dengan realisasi **Rp. 140.012.370.866 (87,37%)**.

### Realisasi Anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan Tahun Anggaran 2021



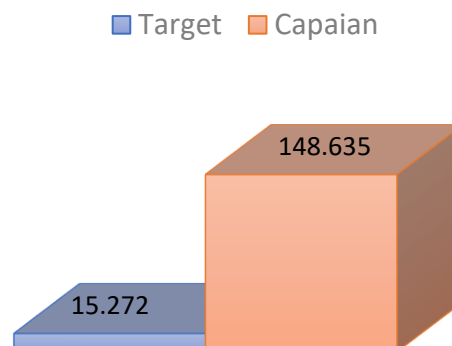
Sementara Anggaran pada Satker Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan di tahun 2021 sebesar **Rp. 27.136.225.000** dengan realisasi netto sebesar **Rp. 26.221.846.415 (96.63%)**.



Dalam menyusun laporan kinerja, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan mengacu pada target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tercantum di Rencana Strategis (Renstra) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Secara ringkas capaian kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan Tahun 2021 sebagai berikut:

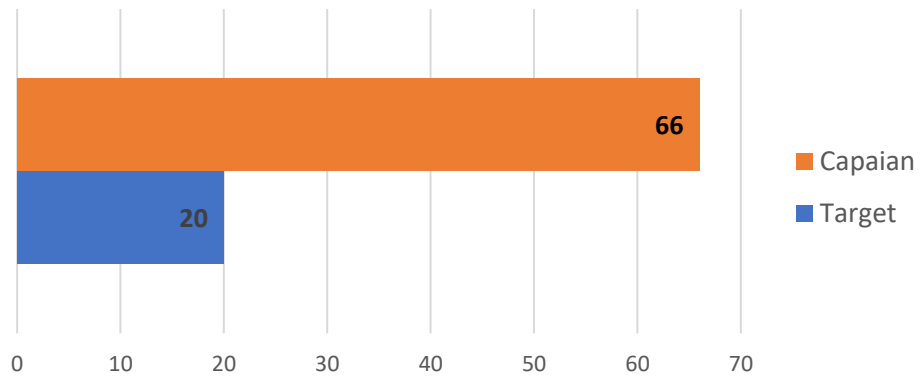
1. Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan berjumlah **148.635 orang, bila dibandingkan dengan target Renstra sebanyak 15.272 orang**, capaian diperoleh sebesar **973%**. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat dari pelatihan bidang kesehatan terakreditasi yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan (BBPK/Bapelkes), Dinas Kesehatan Provinsi melalui Dana Dekonsentrasi dengan sumber anggaran DIPA Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076), serta pelatihan bidang kesehatan yang diselenggarakan dengan sumber anggaran lainnya dari Unit Program dan UPT Vertikal Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Swasta.

**Capaian Indikator Kinerja  
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021**



2. Capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah NSPK terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah disusun sebesar 330%, yaitu 66 NSPK dari target 20 NSPK di tahun 2021. NSPK yang disusun tahun 2021 terdiri dari kurikulum, modul, media pembelajaran, pedoman, petunjuk teknis, dokumen Pemetaan Kebutuhan Pelatihan serta Evaluasi Program Pelatihan yang disusun oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan serta rancangan kurikulum, modul dan media pembelajaran pelatihan bidang kesehatan yang disusun oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

Capaian Indikator Kinerja  
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan  
Tahun Anggaran 2021



Laporan ini diharapkan dapat mempresentasikan sekaligus memberikan gambaran secara komprehensif terkait kondisi-kondisi yang terjadi yang turut mempengaruhi pencapaian indikator kinerja Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia sekaligus memberikan rekomendasi dalam bentuk saran/masukan untuk perbaikan kinerja ke depannya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii	
DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan	2
	C. Tugas dan Fungsi	2
	D. Sumber Daya	7
	E. Sistematika Penulisan	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Aksi	11
	B. Perjanjian Kinerja	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	16
	A. Capaian Kinerja Organisasi	17
	B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan	21
	C. Capaian Klasifikasi Rincian Output Kegiatan	25
	D. Realisasi Belanja dan Anggaran	29
	E. Efisiensi Sumber Daya	33
	F. Inovasi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan	34
BAB IV		
	PENUTUP	36
	Lampiran	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2021–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, dimana salah satu agenda pembangunan tersebut adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Peningkatan mutu SDM khususnya SDM Kesehatan merupakan amanat dari Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam ketersediaan dan peningkatan mutu sumber daya kesehatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan salah satu satuan kerja di bawah Kementerian Kesehatan khususnya berada di bawah koordinasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) yang memiliki tanggung jawab dan tugas pokok meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Pelaksanaan kegiatan di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan mengacu pada Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Kegiatan tahun 2020-2024 yang telah disusun dan telah diterjemahkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Laporan kinerja ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance*, yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legal.

Sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja digunakan **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban, dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja/berhasil tidaknya pencapaian misi instansi serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas.

## **B. TUJUAN**

Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan:

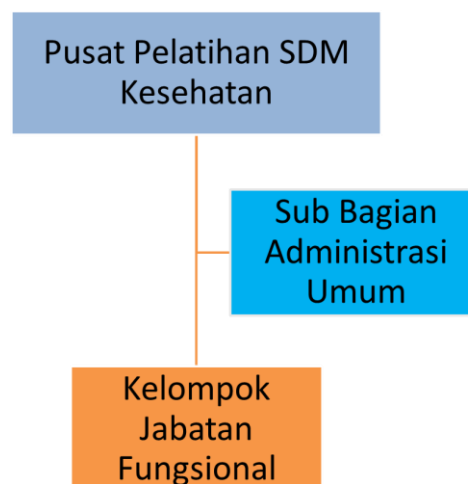
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.

## **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Permenkes Nomor 25 tahun 2020, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas sebagai penyelenggara pelatihan, namun sebagai penyusun kebijakan terkait pelatihan bidang kesehatan. Melalui Undang-Undang Tenaga Kesehatan tahun 2014 pasal 30, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dihadapkan dengan tantangan terkait kebutuhan pelatihan tenaga kesehatan dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengembangan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik. Pasal 31 juga menyebutkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut Pusat Pelatihan SDM Kesehatan bertransformasi menjadi penyusun kebijakan terkait pelatihan serta memegang kendali mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan.

Peran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan semakin berkembang terutama sejak terbitnya undang-undang (UU) ASN pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, yang kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP) No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana dalam pasal 203 terkait pengembangan kompetensi menyebutkan pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dikembangkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendidikan dan pelatihan, dimana pelatihan dapat pula dilaksanakan melalui metode klasikal dan non klasikal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan saat ini menjalani peran dalam pengembangan kompetensi SDM Kesehatan, utamanya melalui pelatihan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pelatihan SDM Kesehatan memiliki struktur organisasi mengacu pada Permenkes Nomor 25 tahun 2021 seperti dalam gambar berikut:

**Struktur Organisasi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan  
(Permenkes Nomor 25 Tahun 2021)**



Berdasarkan Permenkes Nomor 25 Tahun 2020, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia Kesehatan. Dalam mendukung tugas tersebut, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan, institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
2. Pelaksanaan di bidang analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan, dan institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi, pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan teknis dan fungsional, dan pengendalian mutu pelatihan, dan institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan; dan
4. pelaksanaan urusan administrasi Pusat

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2021, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan memiliki pengelompokan uraian fungsi melalui 3 (tiga) kelompok substansi sebagai berikut:

1. Kelompok substansi analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan. Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan terdiri atas:
  - a) Kelompok sub-substansi analisis kompetensi. Kelompok sub-substansi analisis kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
  - b) Kelompok sub-substansi pemetaan kebutuhan pelatihan. Kelompok sub-substansi pemetaan kebutuhan pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan lainnya termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan.

2. Kelompok substansi pengembangan pelatihan. Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengembangan pelatihan terdiri atas:

a) Kelompok sub-substansi pengembangan pelatihan teknis.

Kelompok sub-substansi pengembangan pelatihan teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan termasuk manajemen, upaya, teknis penunjang fungsional dan profesi.

b) Kelompok sub-substansi pengembangan pelatihan fungsional. Kelompok sub-substansi pengembangan pelatihan fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

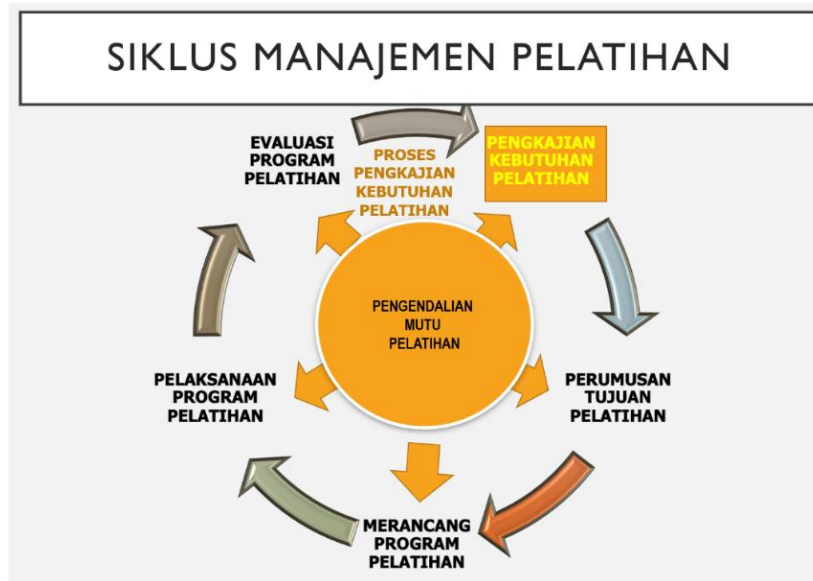
3. Kelompok substansi pengendalian mutu pelatihan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengendalian mutu pelatihan terdiri atas:

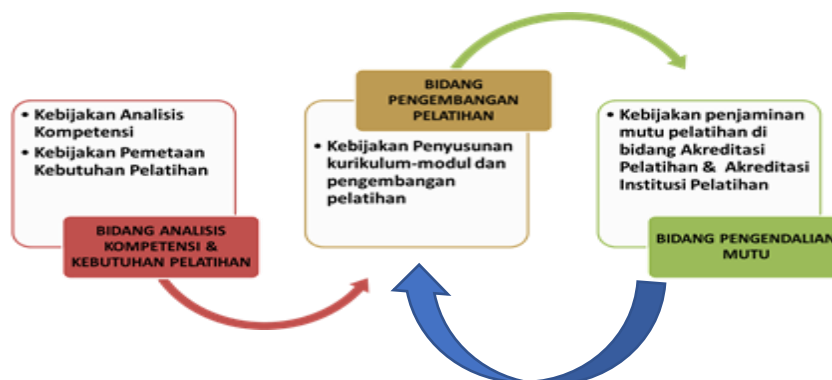
a) Kelompok sub-substansi akreditasi pelatihan. Kelompok sub-substansi akreditasi pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

b) Kelompok sub-substansi akreditasi institusi pelatihan. Kelompok sub-substansi akreditasi institusi pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Meskipun secara teknis Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tidak lagi menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan, tetapi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan terlibat secara aktif dalam siklus manajemen pelatihan, sebagaimana digambarkan dalam gambar di bawah ini:



Proses Manajemen Pelatihan dimulai dari proses pengkajian kebutuhan pelatihan (TNA) untuk mendapatkan *gap* kompetensi SDM Kesehatan atau organisasi kemudian *gap* kompetensi ini dianalisa apakah membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pelatihan atau lainnya. Bila hasil TNA tersebut diperlukan suatu pelatihan maka masuk dalam proses perumusan tujuan pelatihan yang dilanjutkan dengan proses merancang program pelatihan yaitu membuat kurikulum pelatihan dan modul sebagai bahan belajar peserta latih. Setelah kurikulum dan modul pelatihan selesai disusun, proses dilanjutkan dengan pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan, dalam hal ini UPT Bidang Pelatihan Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pelatihan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Siklus Manajemen Pelatihan tersebut bila disandingkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan melalui bidang-bidang yang ada, maka dapat tergambar dalam grafik di bawah ini:



## D. SUMBER DAYA

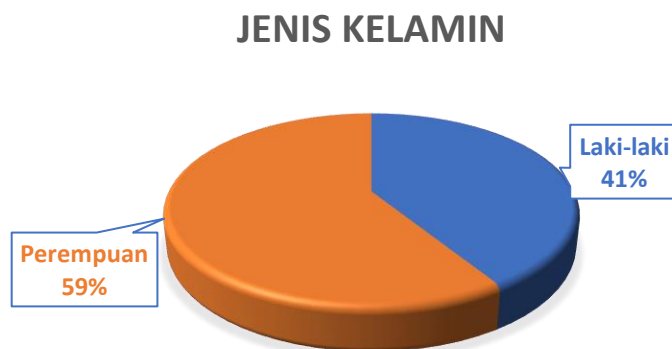
### 1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan berjumlah 91 (sembilan puluh satu) orang pegawai dengan rincian :

- a) 73 (tujuh puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b) 19 (sembilan belas) orang Pegawai Non PNS, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 2 (dua) orang tenaga alihdaya (Outsourcing). Dari 73 (tujuh puluh tiga) orang PNS tersebut di atas, terdapat 4 (empat) orang pegawai sedang berstatus Tugas Belajar (S-2), dan 3 orang pegawai berstatus Izin Belajar.

Adapun rincian lebih lanjut terkait Sumber Daya Manusia di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai berikut:

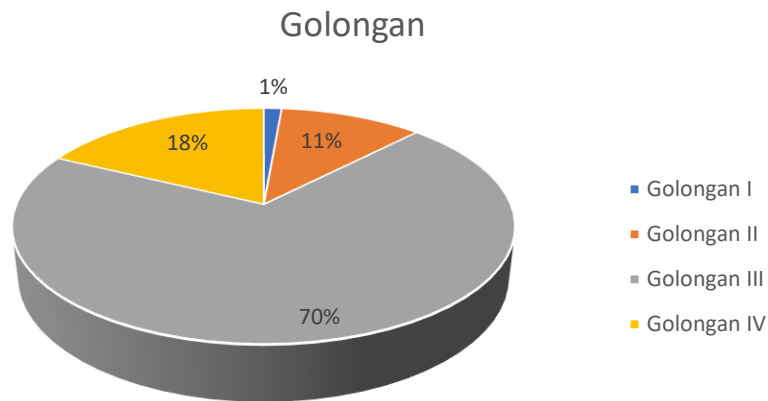
- a. Menurut Jenis Kelamin



Dari total 73 orang ASN di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, sejumlah 43 orang (59%) berjenis kelamin perempuan.

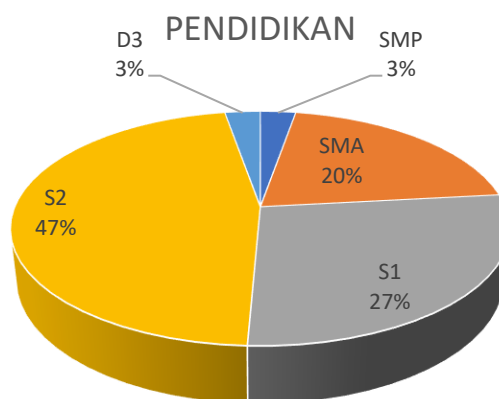
b. Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan

Pegawai di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan didominasi oleh golongan III sebanyak 51 orang (70%), diikuti golongan IV sebanyak 13 orang (18%).

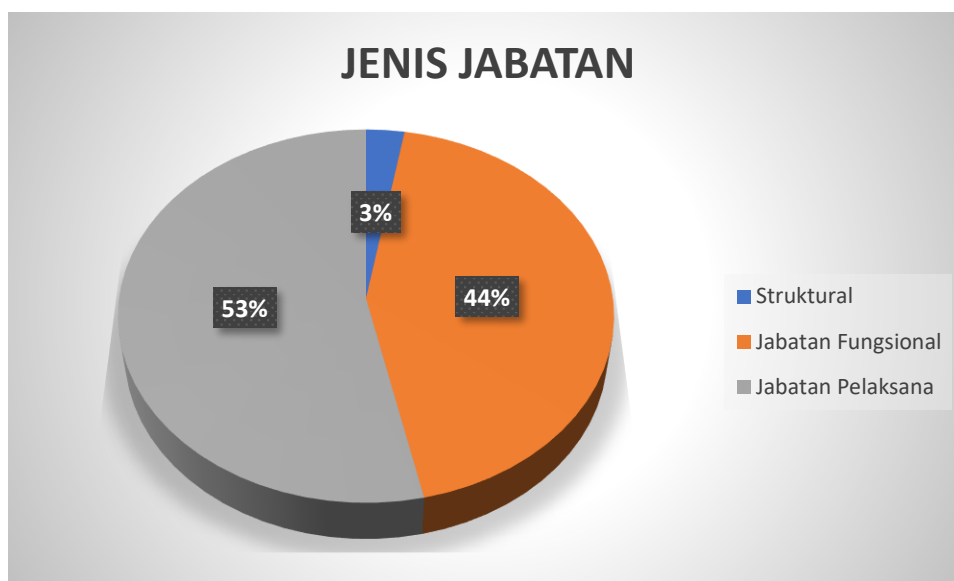


c. Menurut Pendidikan

Berdasarkan latar belakang pendidikan, pegawai di Puslat SDM kesehatan didominasi dari latar belakang pendidikan Pasca Sarjana (S-2) yaitu masing-masing sebanyak 34 orang. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai baik melalui pendidikan (tugas belajar dan izin belajar) dan pelatihan maupun pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah terkait Manajemen ASN.



#### d. Menurut Jabatan



Dari diagram di atas terlihat bahwa sumber daya manusia yang ada di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan didominasi oleh Jabatan Pelaksana sebesar 53% (49 orang), diikuti Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 32 orang, dimana sebanyak 9 orang dari JFT tersebut merupakan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (jabatan eselon 3 dan 4) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sepanjang tahun 2021, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan terus berupaya dalam proses *inpassing*/alih jabatan pegawai menjadi JFT sesuai kebutuhan organisasi yang terdapat di dalam peta jabatan.

#### 2. Sumber Daya Pembiayaan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan, pembiayaan Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). DIPA awal Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076) tahun 2021 sebesar Rp 291.829.405.000. Sepanjang tahun anggaran 2021, terjadi efisiensi anggaran untuk penanggulangan COVID-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta refocussing anggaran sehingga pagu anggaran kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan menjadi Rp 160.257.382.000.

Di dalam pagu Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan tersebut, terdapat alokasi anggaran untuk satker Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang awalnya sebesar Rp. 43.507.687.000, dan setelah efisiensi anggaran sebanyak 4 (empat) kali, pagu satker Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menjadi Rp. 27.136.225.000,-.

### 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021 didukung oleh adanya sarana dan prasarana pendukung. Dalam Laporan SIMAK BMN Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021 memiliki aset BMN di neraca sebesar Rp 1.986.134.000 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah). Nilai tersebut merupakan nilai barang konsumsi, peralatan dan mesin, dan *software*.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari Laporan Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan terdiri dari:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### 2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2021.

### 3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### a. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### b. Realisasi Anggaran

Sub bab ini menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### 4. BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Aksi

Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 mengacu pada visi misi serta arahan presiden. Visi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni

1. Layanan dasar dan perlindungan sosial,
2. Produktivitas, dan
3. Pembangunan karakter.

Melalui tiga pilar di atas, Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.





## Kerangka Pikir Pembangunan Manusia



"Pembangunan Manusia dilakukan berlandaskan pada

Tiga Pilar Pembangunan: 1) Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, 2) Produktivitas, dan 3) Pembangunan Karakter



Menindaklanjuti arah kebijakan RPJMN 2020-2024, Kementerian Kesehatan kemudian menyusun arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024 melalui 5 (lima) strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
5. Penguatan Sistem Kesehatan

Dari ke-5 strategi di atas, Badan PPSDM Kesehatan berperan dalam mendukung strategi Penguatan Sistem Kesehatan, yang diwujudkan melalui upaya Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan. Strategi Badan PPSDM Kesehatan kemudian didukung oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai satker eselon 2 di bawah koordinasi Badan PPSDM Kesehatan dalam upaya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan. Untuk memastikan mutu dan kualitas Pelatihan SDM Kesehatan, dilakukan akreditasi pelatihan sehingga salah satu indikator kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi.



Arah kebijakan dan strategi yang tercantum di Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 didukung melalui pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai berikut:

Program	Sasaran	Indikator
Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

Berdasarkan Indikator Kinerja Program Badan PPSDM Kesehatan tersebut, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 sebagai berikut:

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan Terakreditasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen non Kesehatan terakreditasi (orang)	24,070	15,272	22,800	22,800	22,800
		Jumlah NSPK terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah disusun	15	20	20	20	20

Target Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan *baseline/trend* dari capaian output pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi sebagai satker penerima dana dekonsentrasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu 22.800 orang. Pada proses penyusunan Renstra tahun 2020-2024, target indikator kinerja tahun 2021 akhirnya disesuaikan dengan target alokasi anggaran yang telah disusun dan target pada tahun 2021 disesuaikan dengan target pada penyusunan pagu indikatif, sehingga terjadi penurunan target bila dibandingkan target Renstra pada tahun 2021 dengan target 2021.

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2021 ditetapkan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yang merupakan cascading dari Indikator Kinerja Program Badan PPSDM Kesehatan.

Pada bulan Desember, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mengusulkan revisi perjanjian kinerja tahun 2021 untuk melakukan penyesuaian target dengan Revisi DIPA dan Renja K/L terakhir, sehingga terjadi penyesuaian target kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagaimana dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

## Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021 (Semula)

### PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Tahun : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	15.272 orang
2		Jumlah NSPK Terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang Telah Disusun	20 NSPK

**Jumlah Anggaran Tahun 2021** : Rp. 291.829.405.000,00

(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah )

## Usulan Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021

### PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Tahun : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan	1. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	123.418 orang
		2. Jumlah NSPK Terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang Telah Disusun	57

**Jumlah Anggaran Tahun 2021** : Rp. 160.257.382.000,-

(Seratus Enam Puluh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan merupakan perwujudan dari proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana diuraikan dalam Permenkes Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Akuntabilitas ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diperjanjikan pada tahun 2021. Uraian analisis capaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, menganalisis hal-hal yang mendukung dalam menghambat terkait ketercapaian target atau ketidaktercapaian target, serta menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja. Adapun definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Penghitungan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan yang telah mengikuti Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	Menghitung jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi
	Jumlah NSPK Terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah disusun	Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait pelatihan bidang kesehatan yang disusun yaitu NSPK pengkajian/pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, evaluasi pasca pelatihan, pengendalian mutu pelatihan yang terdiri dari akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan.	Menghitung jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) terkait pelatihan bidang kesehatan yang disusun yaitu NSPK pengkajian/pemetaan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, evaluasi pasca pelatihan, pengendalian mutu pelatihan yang terdiri dari akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

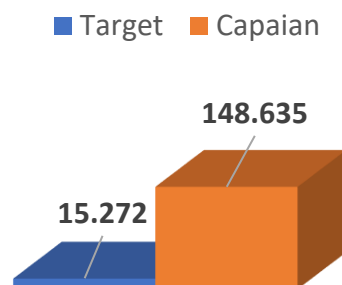
- 1) **Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen non Kesehatan Terakreditasi.**

Pencapaian kinerja Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan diukur dengan membandingkan antara target kinerja baik berdasarkan target Renstra Tahun 2021 maupun berdasarkan target Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja. Capaian di tahun 2021 untuk indikator ini adalah sebesar 973% bila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2021, sedangkan bila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja dengan target dari revisi DIPA per Desember 2021, diperoleh capaian sebesar 120%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.

Penghitungan Capaian Kinerja

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{148.635}{15.272} \times 100\% = 973\%$$

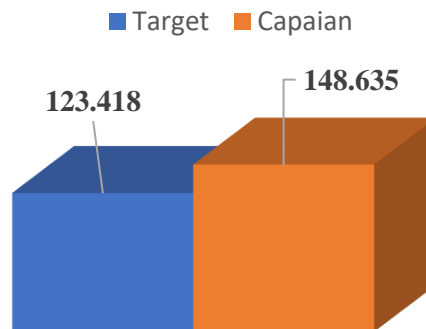
### Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Target Rencana Strategis TA 2021



Penghitungan Capaian Kinerja

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{148.635}{123.418} \times 100\% = 120\%$$

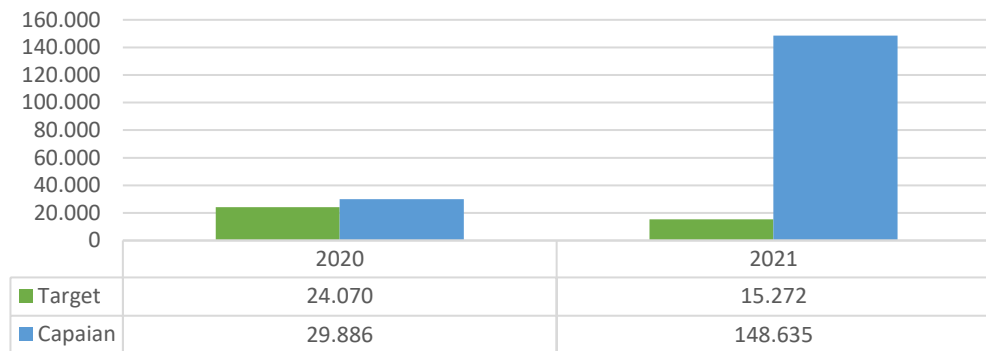
**Capaian Indikator Kinerja Berdasarkan Target  
Perjanjian Kinerja  
TA 2021**



Perbandingan capaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan terhadap target Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2021 sebagai berikut :

Tahun	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian	%
2020	Pelatihan Kesehatan, Kesehatan dan Manajemen non Kesehatan	1) Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi (orang)	24.070	29.886	124
		2) Jumlah NSPK terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah disusun	15	20	133
2021	Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsi Kesehatan, Manajemen non Kesehatan	1) Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi (orang)	15.272	148.635	973
		2) Jumlah NSPK terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah disusun	20	66	330

### Tren Capaian Kinerja Berdasarkan Target Renstra Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2020-2021



Bila dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada capaian kinerja sampai di level 973%. Hal ini terjadi disebabkan pada tahun 2021 terdapat Penyelenggaraan Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi COVID-19 bagi Vaksinator yang dilaksanakan dengan metode *full* daring, yang diikuti oleh tenaga kesehatan (Dokter, Perawat dan Bidan) yang tersebar di 34 provinsi sebagai salah satu program percepatan vaksinasi COVID-19 tahun 2021.

Capaian indikator kinerja kegiatan “Jumlah SDM kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi” dalam pelaksanaannya diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan yang diterbitkan untuk penyelenggaraan pelatihan bersumber anggaran kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076) yang diselenggarakan oleh:

1. Unit pelaksana teknis (UPT) Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 3 (tiga) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) yaitu BBPK Jakarta, BBPK Ciloto, BBPK Makassar, Bapelkes Cikarang, Bapelkes Semarang dan Bapelkes Batam,
2. Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT Pelatihan Bidang Kesehatan provinsi bersumber dana dekonsentrasi Badan PPSDM Kesehatan

Selain itu, capaian indikator kinerja tersebut juga diperoleh dari penomoran sertifikat yang diterbitkan untuk penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang pembiayaannya di luar anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076) DIPA Badan PPSDM Kesehatan, yaitu pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Unit program dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan, Penyelenggara pelatihan swasta dan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Provinsi (Bapelkes Daerah).

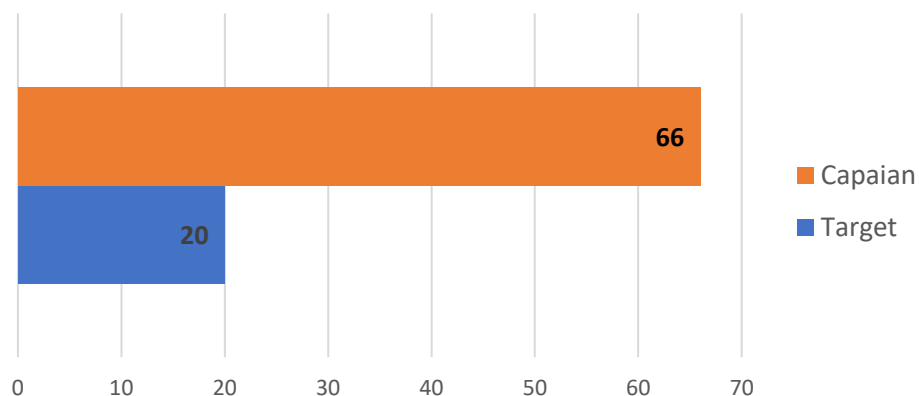
## 2) Indikator Kinerja Jumlah NSPK terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang Telah Disusun

Penyusunan NSPK terkait pelatihan bidang kesehatan merupakan tugas dan fungsi dari Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai penyusun kebijakan teknis terkait pelatihan SDM Kesehatan. NSPK yang dimaksud adalah pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, kurikulum serta modul terkait pelatihan bidang kesehatan. Dari total target 20 NSPK di tahun 2021 berdasarkan Renstra, tercapai sebanyak 66 NSPK (330%), sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Penghitungan Capaian Kinerja

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{66}{20} \times 100\% = 330\%$$

**Capaian Indikator Kinerja  
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan  
Tahun Anggaran 2021**



Bila dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021, maka diperoleh capaian sebesar 118%, dimana dari target 57 NSPK yang disusun, tercapai sebanyak 66 NSPK.

Penghitungan Capaian Kinerja

$$\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{66}{57} \times 100\% = 116\%$$

## B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

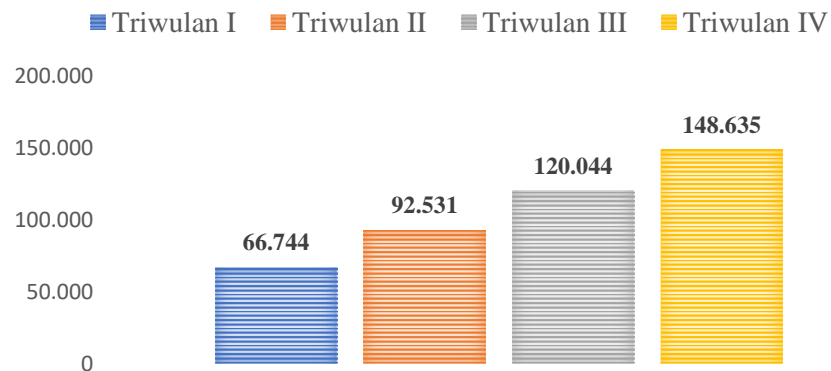
### 1) Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan Terakreditasi

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah penomoran sertifikat pelatihan bidang kesehatan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, dimana pelatihan tersebut diakreditasi oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta PP Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan. Setiap pelatihan yang telah terakreditasi akan dikeluarkan penomoran sertifikatnya oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, sehingga capaian indikator kinerja diperoleh dari jumlah penomoran sertifikat yang diterbitkan untuk setiap pelatihan yang telah terakreditasi, baik pelatihan yang bersumber dana kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan (2076), maupun sumber anggaran lainnya seperti APBN Unit Program Kemenkes, APBD, serta swasta.

Dari total capaian sebanyak 148.635, sebesar 83% berasal dari sumber anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan, yaitu dari pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan, serta Dinas Kesehatan Provinsi penerima dana dekonsentrasi, dimana sebagian besar pelaksanaan pelatihan dilaksanakan secara daring maupun *blended*.

Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, capaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mengalami peningkatan di tahun 2021, hal tersebut terlihat dari pergerakan per triwulan capaian indikator dapat terlihat dalam grafik di bawah ini:

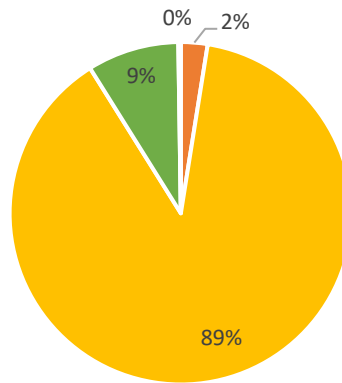
**Trend Capaian Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan Terakreditasi TA 2021**



Dalam grafik di atas terlihat bahwa pergerakan yang konstan dari triwulan I ke triwulan II dan seterusnya. Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi COVID-19 bagi Vaksinator telah mulai dilaksanakan sejak bulan Januari tahun 2021 oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan. Sampai dengan Triwulan IV pelatihan masih diselenggarakan khususnya oleh Satker Dekonsentrasi, setelah sebelumnya terkendala status level PPKM di provinsi masing-masing.

Dari capaian 148.635 orang tersebut, jika dilihat berdasarkan jenis pelatihan, proporsi pelatihan teknis kesehatan mendominasi sampai dengan 89%, diikuti dengan pelatihan fungsional kesehatan sebesar 9%, sebagaimana digambarkan dalam tabel dan grafik di bawah ini:

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah
1	Manajemen Kesehatan	3.741
2	Teknis Kesehatan	131.670
3	Fungsional Kesehatan	12.870
4	Teknis Non Kesehatan	354
<b>TOTAL</b>		<b>148.635</b>



■ Manajemen Kesehatan 
 ■ Teknis Kesehatan 
 ■ Fungsional Kesehatan 
 ■ Teknis Non Kesehatan

## 2) Indikator Kinerja Jumlah NSPK terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang Telah Disusun

Capaian indikator ini diperoleh dari NSPK yang disusun baik oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan maupun UPT Bidang Pelatihan Kesehatan di tahun 2021. Adapun NSPK yang dimaksud dalam indikator ini termasuk pedoman, petunjuk teknis/pelaksanaan terkait pelatihan bidang kesehatan serta kurikulum dan modul serta media pembelajaran pada pelatihan teknis dan fungsional kesehatan baik yang disusun oleh Pusat Pelatihan SDM kesehatan maupun UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

Target NSPK yang disusun tahun 2021 berdasarkan Renstra adalah sebanyak 20 NSPK, selama tahun 2021 terdapat beberapa penyesuaian prioritas penyusunan NSPK untuk menyikapi kondisi masa pandemi, serta adanya kebutuhan penyusunan kurikulum dan modul untuk pelaksanaan program prioritas di tahun berikutnya, utamanya dalam peningkatan penyelenggaraan pelatihan jarak jauh dan *e-learning*, sehingga capaian NSPK di tahun 2021 mencapai 66 NSPK (350%).

Adapun rincian NSPK yang telah disusun sepanjang tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

- 1) Pedoman Penilaian Kompetensi
- 2) Revisi Pedoman Training Need Assesment
- 3) Kurikulum Latihan Jarak Jauh (LJJ) Jabatan Fungsional Bidan
- 4) Kurikulum Latihan Jarak Jauh (LJJ) Jabatan Fungsional Perawat
- 5) Kurikulum Latihan Jarak Jauh (LJJ) Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi Mulut
- 6) Kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Apoteker
- 7) Kurikulum Pelatihan Perkesmas bagi Koordinator Perkesmas

- 8) Kurikulum Training Of Trainer (ToT) Perawat Kesehatan Masyarakat
- 9) Kurikulum Pelatihan Kesehatan Haji Masa Pandemi Covid
- 10) Kurikulum Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di FKTP
- 11) Kurikulum TOT Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di FKTP
- 12) Kurikulum LJJ Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
- 13) Modul Latihan Jarak Jauh (LJJ) Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan
- 14) Modul Latihan Jarak Jauh (LJJ) Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat
- 15) Modul Latihan Jarak Jauh (LJJ) Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
- 16) Modul Pelatihan Perkesmas bagi Koordinator Perkesmas
- 17) Modul Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
- 18) Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Apoteker
- 19) Modul LJJ Tim Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
- 20) Pedoman Pengembangan Latihan Jarak Jauh Bidang Kesehatan
- 21) Evaluasi Program Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi COVID-19 bagi Vaksinator
- 22) Evaluasi Program Pelatihan Investigasi Wabah/KLB Berbasis One Health
- 23) Evaluasi Program Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas
- 24) Training Need Assesmen Jabatan Fungsional Bidan
- 25) Training Need Assesmen Jabatan Fungsional Perawat
- 26) Training Need Assesmen Jabatan Fungsional Terapis Gigi Mulut
- 27) Training Need Assesmen di Rumah Sakit Vertikal Kemenkes
- 28) Revisi Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Bidang Kesehatan
- 29) Pedoman Pengendali Pelatihan Bidang Kesehatan
- 30) Revisi Pedoman Evaluasi Pasca Pelatihan
- 31) Pedoman Penjaminan Mutu Pelatihan
- 32) Pedoman Akreditasi Institusi
- 33) Instrumen Akreditasi Institusi
- 34) Pedoman Audit Mutu Internal
- 35) Juknis Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan
- 36) Juknis Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat
- 37) Juknis Penyelenggaraan Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
- 38) Juknis Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK)
- 39) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Kebijakan Pelatihan SDM Kesehatan
- 40) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Penguji Uji Kompetensi (2 Media)
- 41) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Jabatan Fungsional Bidan (2 Media)
- 42) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Jabatan Fungsional Perawat (2 Media)
- 43) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut ( 2 Media)
- 44) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Building Learning Commitment

- 45) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Anti Korupsi
- 46) Media Pembelajaran dan Bahan Ajar Pelatihan Jarak Jauh Tenaga Pelatih Kesehatan (2 Media)
- 47) Media Pembelajaran Pelatihan EKG-AED bagi Dokter Keluarga
- 48) Media dan Bahan Ajar Kebijakan Pelatihan Teknis Kesehatan
- 49) Media dan Bahan Ajar Penyusunan Kurikulum Pelatihan
- 50) Media e-learning EKG-AED bagi Dokter Keluarga
- 51) Modul Latihan Jarak Jauh pada Pelatihan Pengelolaan Limbah Cair di Fasyankes Bagi SDM Kesehatan
- 52) Modul Latihan Jarak Jauh (LJJ) pada Pelatihan Fasilitator STBM
- 53) Media Teknologi Tepat Guna Kesehatan Lingkungan
- 54) Rancangan Kurikulum Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan
- 55) Rancangan Kurikulum Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan
- 56) Rancangan Kurikulum Pelatihan Publik Speaking Bagi SDM Kesehatan
- 57) Rancangan Kurikulum Massive Open Online Course One Health (basic knowledge)
- 58) E Modul Pelatihan BTCLS Materi Penatalaksanaan Pasien dengan Gangguan Sirkulasi dan Materi Triage Pasien
- 59) E Modul Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan
- 60) Modul E learning Mata Pelatihan Tim Efektif pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

### C. Capaian Klasifikasi Rincian Output Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tidak lepas dari capaian klasifikasi rincian output (KRO) Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021, dimana jumlah target indikator kinerja Jumlah SDM kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi berasal dari 3 (tiga) klasifikasi rincian pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi melalui dana dekonsetrasi. Adapun rincian klasifikasi rincian output tersebut adalah:

No	Kode	Klasifikasi Rincian Output	Target
1	2076. SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	7.016
2	2076. DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	116.402
<b>TOTAL</b>			<b>123.418</b>

## 1) **Klasifikasi Rincian Output Pelatihan Bidang Sosial (SCJ)**

Output pelatihan SDM Kesehatan dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK), Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), Dinas Kesehatan Provinsi melalui dana dekonsentrasi. Output ini merupakan salah satu pendukung capaian target IKK Jumlah SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Manajemen Non Kesehatan Terakreditasi. Target pada KRO ini adalah sebanyak 7.016 orang, dengan capaian sebanyak 6.671 orang (95%).

Adapun jenis pelatihan yang masuk ke dalam KRO ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah Rumah Sakit
- 2) Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu
- 3) Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Team
- 4) Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- 5) Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular
- 6) Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak
- 7) Pelatihan Konseling Menyusui
- 8) Pelatihan Bagi Dokter Keluarga di Puskesmas
- 9) Pelatihan Pemeriksaan PCR COVID19 BAGI Tenaga ATLM
- 10) Pelatihan Pengelolaan Limbah Cair Domestik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi SDM Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kerjanya
- 11) Pelatihan PERKESMAS
- 12) Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas

## 2) **Klasifikasi Rincian Output Pelatihan Bidang Sosial (DCJ)**

Pada tahun 2021, terdapat 2 (dua) KRO Pelatihan Bidang Sosial, yaitu pelatihan non prioritas (2076.DCJ) dan pelatihan prioritas (2076.SCJ). Output ini dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi sebagai satker Dekonsentrasi. Selama masa pandemi, metode pelaksanaan pelatihan dan pembekalan dilaksanakan secara *full online* serta *blended*, dan beberapa provinsi dilakukan secara full klasikal.

Adapun jenis pelatihan yang masuk ke dalam KRO ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Training Of Trainer
- 2) Pelatihan Training Of Course
- 3) Pelatihan Tenaga Pelatih Program Kesehatan
- 4) Pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia
- 5) Pelatihan Panitia Pelaksana Ibadah Haji
- 6) E-Learning Manajemen Kesehatan haji bagi Pengelola Program Haji di Dinkes Prov/Kab/Kota
- 7) Pelatihan Ante Natal Care
- 8) Pelatihan One Health
- 9) Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support
- 10) Pelatihan Advanced Cardiac Life Support
- 11) Pelatihan Epidemiologi
- 12) Pelatihan Pengendali Pelatihan
- 13) Pelatihan Farmasi Klinik Dasar
- 14) Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit
- 15) Pelatihan SDIDTK Bagi Petugas Kesehatan dan Pemantauan Pertumbuhan
- 16) Pelatihan Manajemen Berat Bayi Lahir Rendah
- 17) Pelatihan Manajemen Terapan Bagi Pengelola Kesehatan
- 18) Pelatihan Advokasi Surveilans Berbasis Epidemiologi
- 19) Pelatihan Vaksin Covid-19
- 20) Pelatihan Manajemen Kinerja
- 21) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (PNBP)
- 22) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PNBP)
- 23) Pelatihan Pengarustamaan Gender Bidang Kesehatan
- 24) Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran responsive Gender
- 25) Pelatihan Manajemen Puskesmas
- 26) Pelatihan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
- 27) Pelatihan Fungsional Kesehatan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 28) Pelatihan Fungsional Non Kesehatan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 29) Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional
- 30) Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil
- 31) Pelatihan Jabatan Fungsional Entomologi
- 32) Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi
- 33) Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat
- 34) Pelatihan Penugasan Non Regiuler Bidang Kesehatan
- 35) Workshop Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan
- 36) Pelatihan Pembuatan Video Pembelajaran bagi Tenaga Pelatih Kesehatan
- 37) Pelatihan Coaching dan Mentoring
- 38) Pelatihan Tim Gerak Cepat di Puskesmas (SKN)
- 39) Pelatihan Promosi Kesehatan Bagi Petugas Puskesmas (SKN)
- 40) Pelatihan Surveilans Kesehatan Berbasis Epidemiologi Bagi Petugas Puskesmas

Dari total target KRO Pelatihan Bidang Sosial (DCJ) sebesar 116.402 orang, diperoleh capaian 119.654 orang (103%). Namun dari total target tersebut, target yang mendukung pencapaian IKK adalah sebanyak 105.520 orang, dengan capaian sebesar 106.143 (91%), karena di dalam KRO tersebut terdapat target Workshop Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan sebanyak 10.882 orang.

Selain KRO terkait pelatihan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan, terdapat KRO Norma, Standar, Prosedur, Kriteria sebagai output utama tercapainya kinerja kegiatan pelatihan SDM Kesehatan dalam hal capaian jumlah NSPK terkait Pelatihan Bidang Kesehatan.

KRO tersebut terdiri dari 10 Rincian Output (RO) yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dengan rincian capaian sebagai berikut:

- 1) Pemetaan Kebutuhan Pelatihan (4 NSPK)
- 2) Rancangan Kurikulum Pelatihan Teknis dan Fungsional Bidang Kesehatan (4 NSPK)
- 3) Kurikulum Pelatihan Bidang Kesehatan (10 NSPK)
- 4) Modul Pembelajaran Pelatihan Bidang Kesehatan (12 NSPK)
- 5) Media Pembelajaran Pelatihan Kesehatan (19 NSPK)
- 6) Pedoman/Juknis/Juklak Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (2 NSPK)
- 7) Pedoman/Juknis/Juklak Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan (2 NSPK)
- 8) Pedoman/Juknis/Juklak Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan (4 NSPK)
- 9) Pedoman/Juknis/Juklak Pengendalian Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan (6 NSPK)
- 10) Evaluasi Program Pelatihan (3 NSPK)

## D. Realisasi Belanja dan Anggaran

### 1. Realisasi Anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan

Anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan (2076) di awal tahun 2021 sebesar Rp 291.829.405.000. Sepanjang tahun 2021, terdapat efisiensi anggaran untuk penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mengakibatkan pengurangan anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan menjadi Rp. 160.257.382.000. Dari pagu terakhir kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan, daya serap anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 (berdasarkan OM SPAN) sebesar Rp. 140.874.352.942 (87,37%).

### 2. Realisasi Anggaran Satker Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2021 Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sebesar Rp. 43.507.687.000,-. Alokasi anggaran tersebut kemudian mengalami efisiensi anggaran sebanyak 4 (empat) kali untuk penanggulangan COVID-19 dan refocussing anggaran, sehingga pagu Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menjadi Rp. 27.136.225.000, dengan realisasi sebesar Rp. 26.221.846.415. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi rincian output, maka rincian realisasi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dapat terlihat di tabel di bawah ini:

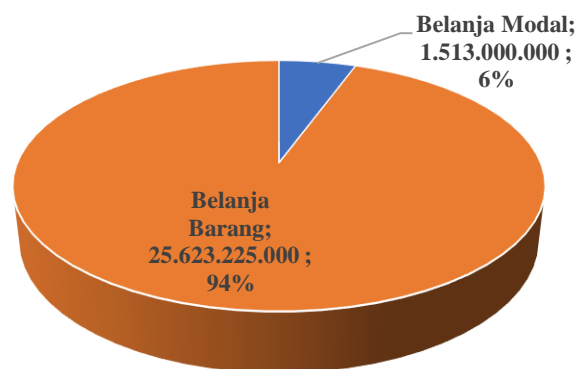
**Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021**  
**Berdasarkan Klasifikasi Rincian Output**

No.	Kode   Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	%	Target	Capaian
<b>I</b>	<b>2076 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>17.441.632.000</b>	<b>16.728.550.014</b>	<b>95,91%</b>		
1	2076ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	377.817.000	359.853.589	95,25%	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan
2	2076ADB Akreditasi Produk	928.210.000	916.166.792	98,70%	500 Produk	1720 Produk
3	2076ADE Akreditasi Lembaga	1.032.990.000	928.652.674	89,90%	19 Lembaga	16 Lembaga
4	2076AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12.734.081.000	12.250.442.294	96,20%	49 NSPK	56 NSPK
5	2076BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	366.990.000	352.128.510	95,95%	33 Lembaga	34 Lembaga
6	2076BGD Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	48.624.000	42.572.500	87,55%	1 Lembaga	1 Lembaga
7	2076DCJ Pelatihan Bidang Sosial	1.898.140.000	1.828.952.710	96,35%	725 Orang	3454 Orang
8	2076FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	54.780.000	49.780.945	90,87%	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)
<b>II</b>	<b>4399 Tata Kelola SDM</b>	<b>1.430.810.000</b>	<b>1.428.697.935</b>	<b>99,85%</b>		
1	4399BGD Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	1.430.810.000	1.428.697.935	99,85%	1 Lembaga	1 Lembaga
<b>III</b>	<b>4817 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>8.263.783.000</b>	<b>8.119.303.427</b>	<b>98,25%</b>		
1	4817EAA Layanan Perkantoran	2.546.416.000	2.536.477.438	99,61%	1 Layanan	1 Layanan
2	4817EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	685.156.000	676.415.209	98,72%	1 Layanan	1 Layanan
3	4817EAC Layanan Umum	894.560.000	859.105.968	96,04%	1 Layanan	1 Layanan
4	4817EAD Layanan Sarana Internal	1.213.000.000	1.203.620.000	99,23%	50 unit	50 unit
5	4817EAF Layanan SDM	2.675.468.000	2.606.528.794	97,42%	3090 Orang	5381 Orang
6	4817EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	249.183.000	237.156.018	95,17%	1 Layanan	1 Layanan
	<b>Total</b>	<b>27.136.225.000</b>	<b>26.221.846.415</b>	<b>96,63%</b>		

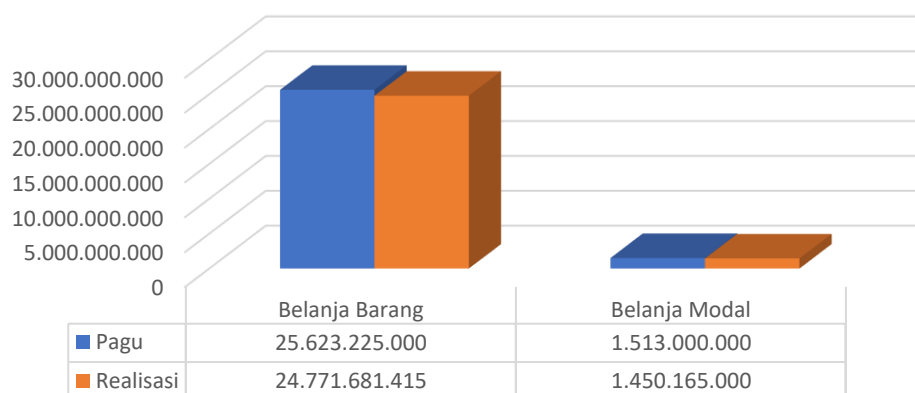
Jika berdasarkan jenis belanja, pagu belanja modal pada Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp. 1.513.000.000 yang dialokasikan untuk pengadaan/kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan alat pengolah data (laptop, PC, Printer, scanner, Kamera Video Conference)
2. Peralatan perkantoran (meja kerja studio, lemari arsip dan filling cabinet)
3. Pengembangan aplikasi e-Sertifikat
4. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pelatihan (SIBULAT)

Sedangkan pagu belanja barang Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebesar Rp. 26.026.075.000. Proporsi anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan berdasarkan jenis belanja tergambar dalam grafik di bawah ini:



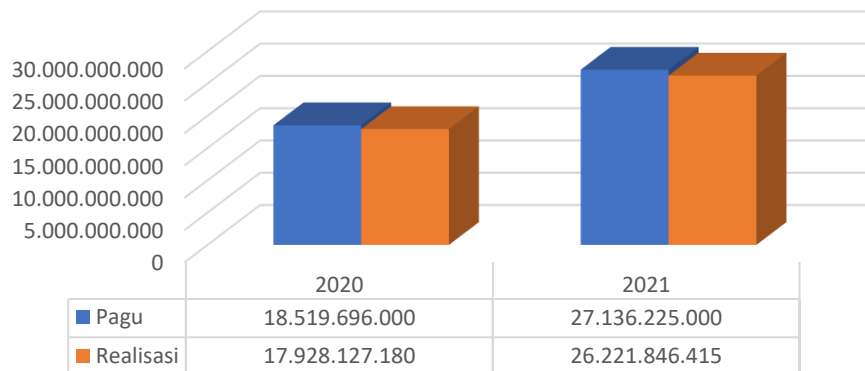
Realisasi belanja modal Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebesar Rp 1.450.165.000 (95,8%). Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tergambar dalam grafik berikut:



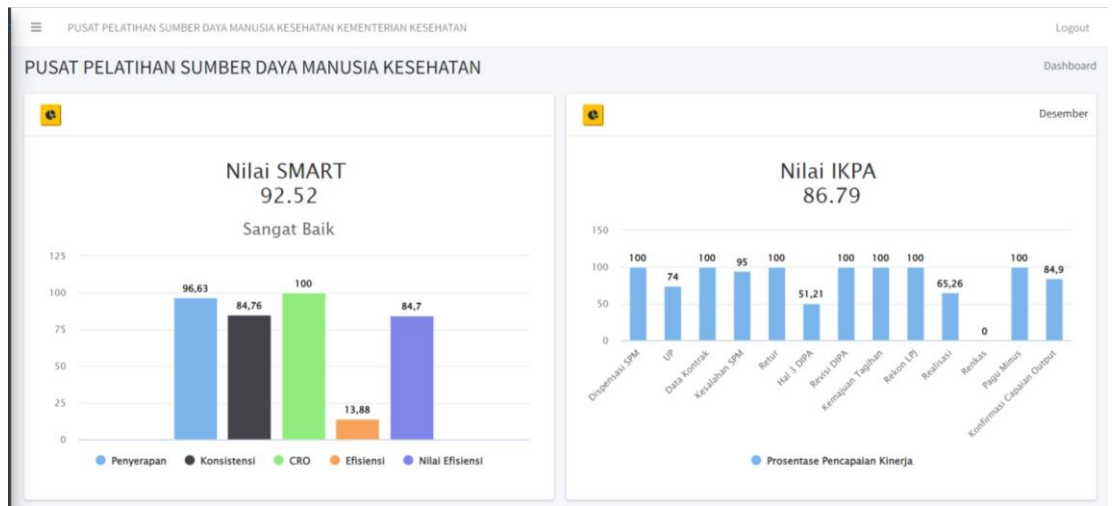
### A. Tren Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

Jika dibandingkan realisasi anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, maka diperoleh perbandingan dalam grafik di bawah ini:

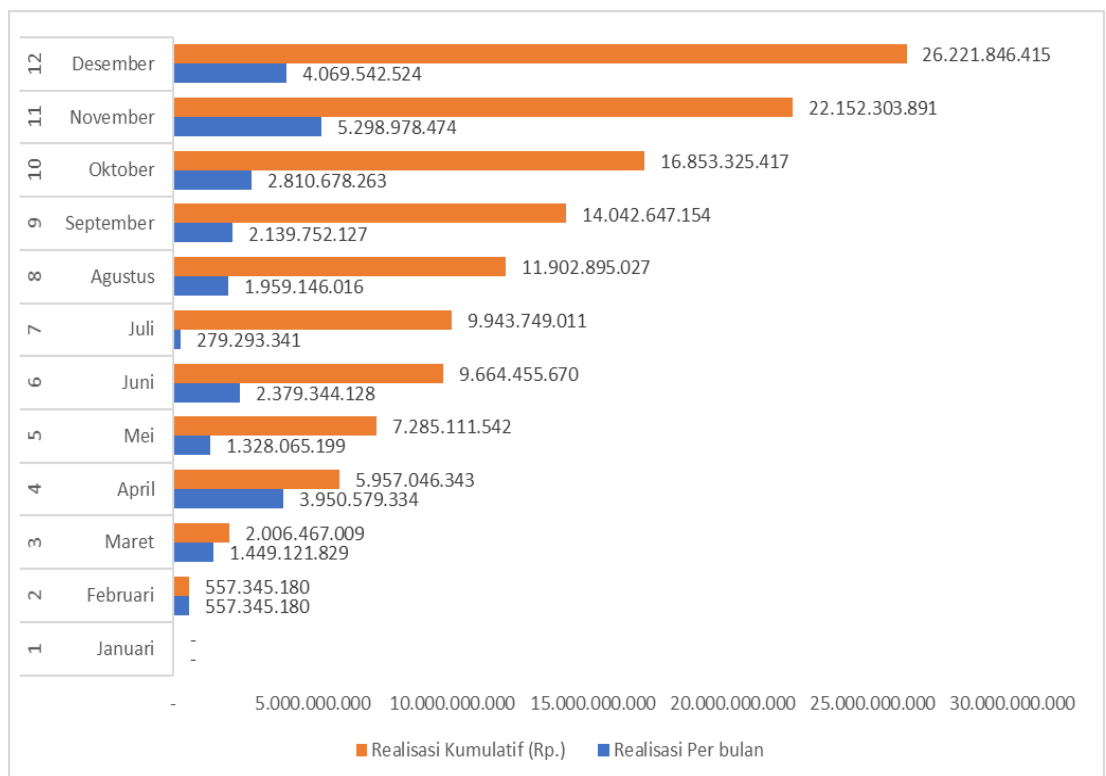
**Tren Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2020-2021**



Dari grafik di atas, rata-rata daya serap anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam di atas 95%. Target indikator kinerja serta indikator keluaran kegiatan telah tercapai seluruhnya, meskipun bila dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pelatihan yang dilaksanakan meningkat serta output NSPK yang dihasilkan juga melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya pembiayaan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk dapat melaksanakan kegiatan secara efisien di tahun 2021. Hal ini didukung dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) berdasarkan dashboard aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan sebagai berikut:



Jika dilihat dari tren realisasi sepanjang tahun 2021, proporsi realisasi terbesar berada di Triwulan IV, dikarenakan kegiatan-kegiatan tatap muka dan perjalanan dinas baru dapat mulai kembali setelah level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menurun. Gambaran tren realisasi bulanan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2021 tergambar dalam tabel dan grafik di bawah ini:



No.	Bulan	Realisasi Per bulan	Realisasi Kumulatif (Rp.)
1	Januari	-	-
2	Februari	557.345.180	557.345.180
3	Maret	1.449.121.829	2.006.467.009
4	April	3.950.579.334	5.957.046.343
5	Mei	1.328.065.199	7.285.111.542
6	Juni	2.379.344.128	9.664.455.670
7	Juli	279.293.341	9.943.749.011
8	Agustus	1.959.146.016	11.902.895.027
9	September	2.139.752.127	14.042.647.154
10	Oktober	2.810.678.263	16.853.325.417
11	November	5.298.978.474	22.152.303.891
12	Desember	4.069.542.524	26.221.846.415

### E. Efisiensi Sumber Daya

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan telah melakukan upaya dalam hal efisiensi sumber daya, salah satunya adalah efisiensi anggaran. Pagu awal Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebesar Rp. 43.507.687.000, sepanjang tahun anggaran telah terjadi efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Tanggal DIPA	Pagu		Nilai Efisiensi	Keterangan
			Semula	Menjadi		
1	DIPA Revisi 6 (Efisiensi Tahap IV)	11 September 2021	43.507.687.000	31.297.108.000	12.210.579.000	Refocussing dan Efisiensi Anggaran
2	DIPA Revisi 8 (Efisiensi Tahap V)	21 Oktober 2021	31.297.108.000	28.639.075.000	2.658.033.000	Refocussing dan Efisiensi Anggaran
3	DIPA Revisi 9 (Efisiensi Tahap VI)	8 November 2021	28.639.075.000	27.539.075.000	1.100.000.000	Refocussing dan Efisiensi Anggaran
4	DIPA Revisi 13 (Efisiensi Tahap VII)	18 Desember 2021	27.539.075.000	27.136.225.000	402.850.000	Refocussing Anggaran dalam rangka Pembayaran Klaim Pasien COVID-19
<b>TOTAL EFISIENSI</b>					<b>16.371.462.000</b>	

Total efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sepanjang tahun anggaran 2021 adalah Rp 16.371.462.000, efisiensi anggaran tersebut merupakan berasal dari efisiensi anggaran kegiatan yang telah diidentifikasi sebagai anggaran yang dapat diefisiensi karena perubahan metode pelaksanaan kegiatan.

Di masa pandemi, efisiensi tidak hanya terjadi dalam hal anggaran, tetapi juga melalui metode pelaksanaan kegiatan yang lebih banyak dilaksanakan secara daring. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi hal yang utama, sehingga pertemuan-pertemuan yang biasanya dilakukan tatap muka serta perjalanan dinas kini dilaksanakan secara virtual/daring dengan tidak mengurangi esensi dan output pertemuan yang dihasilkan jika dilaksanakan dengan tatap muka.

#### **F. Inovasi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2021**

Sebagai upaya pencapaian sasaran program Pusat Pelatihan SDM Kesehatan melalui strategi yang telah diuraikan, dilaksanakan beberapa inovasi sebagai berikut :

1. Menyusun *grand design* Sistem Informasi *Corporate University* (Corpu) Kementerian Kesehatan, sebagai tindak lanjut *road map* Corpu Kemenkes sampai dengan tahun 2024, serta menyusun *grand design* awal Corpu sehingga arah menuju transformasi Corpu menjadi lebih terarah dan konsisten.
2. Pengembangan sistem informasi sertifikat pelatihan bidang kesehatan (aplikasi e-sertifikat pelatihan). Kedepannya sertifikat pelatihan bidang kesehatan akan ditandatangani secara digital dan diterima oleh peserta latih dalam bentuk elektronik, untuk selanjutnya database peserta latih khususnya tenaga Kesehatan dari seluruh Indonesia akan terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI SDM). Hal ini akan mempermudah analisis capaian indikator kinerja program Badan PPSDM Kesehatan serta indikator kinerja kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan kedepannya.
3. Uji coba Sistem Informasi Akreditasi Institusi (SIAKSI), yang nantinya akan mempermudah proses pembinaan institusi pelatihan bidang Kesehatan yang telah terakreditasi melalui audit mutu eksternal, fasilitasi institusi yang akan di re-akreditasi maupun yang akan dilakukan penilaian akreditasi untuk pertama kali karena dilakukan secara daring. Data-data terkait sumber daya institusi

pelatihan bidang kesehatan yang telah terakreditasi nantinya juga berada di dalam database sistem informasi ini.

4. Pengembangan Learning Management System (LMS) Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelatihan jarak jauh.
5. Pembuatan Media dan Bahan Ajar Pembelajaran Pelatihan Jarak Jauh baik untuk pelatihan Teknis Kesehatan dan Fungsional Kesehatan. Kedepannya diharapkan penyelenggaraan Latihan Jarak Jauh (LJJ) Bidang Kesehatan semakin dimaksimalkan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai pencapaian kinerja Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Secara umum pencapaian kinerja Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan sangat baik, didukung dengan daya serap anggaran sebesar 96,63%.

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja utamanya di masa pandemi diantaranya melalui penyesuaian kebijakan metode penyelenggaraan pelatihan yang dapat dilaksanakan secara klasikal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, daring maupun *blended*. Kedepannya, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan berkomitmen untuk terus berinovasi mengembangkan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pelatihan utamanya melalui Pelatihan Jarak Jauh (LJJ), *e-learning* didukung dengan *Learning Management System* yang terintegrasi.

Beberapa upaya yang dilakukan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan diantaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelatihan baik pelatihan yang dilaksanakan dengan dana dekonsentrasi maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh unit program, rumah sakit maupun swasta. Hal ini juga sebagai upaya agar pelatihan yang dilaksanakan sesuai standar yang tercantum dalam pedoman akreditasi pelatihan yang sebelumnya telah diajukan sehingga nantinya pelatihan tersebut berhak mendapatkan sertifikat yang diakui sesuai dengan indikator kinerja yang ingin dicapai.

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga terus melakukan inovasi untuk mengikuti tantangan menuju revolusi industri 4.0 yang saat ini lebih mengedepankan penggunaan teknologi dan informasi. Pusat Pelatihan SDM kesehatan telah memiliki Sistem Akreditasi Pelatihan (SIKPEL) untuk mempermudah proses pengajuan akreditasi pelatihan agar semakin efektif dan efisien, sekaligus meminimalisir terjadinya *human error* Pada tahun 2021, Pusat Pelatihan SDM kesehatan juga mulai merancang pengembangan sistem informasi aplikasi e-sertifikat, dimana sertifikat pelatihan bidang kesehatan yang dikeluarkan dalam bentuk digital dengan tanda tangan elektronik (TTE).

Ke depannya diharapkan integrasi data seperti data penomoran sertifikat pelatihan SDM Kesehatan, serta data tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan akan terintegrasi ke dalam SIAKPEL untuk memudahkan monitoring serta perolehan data kinerja yang lebih valid dan reliabel, dan kedepannya diharapkan data-data peserta latih yang berasal dari tenaga kesehatan akan terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SI-SDMK).

Selain itu, di tahun 2021 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga memulai perancangan sistem informasi akreditasi institusi pelatihan serta pengembangan *Learning Management System (LMS)* pelatihan fungsional kesehatan. Rangkaian pengembangan sistem informasi tersebut merupakan komitmen Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam mengembangkan kebijakan terkait metode dan teknologi manajemen kediklatan.

Dalam rangka mengoptimalkan peran monitoring dan evaluasi penyelenggaraan anggaran kegiatan pelatihan SDM Kesehatan, kedepannya diharapkan penerapan integrasi data sertifikat pelatihan dapat terwujud sehingga Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dapat secara real time memonitor capaian pelatihan SDM Kesehatan yang diselenggarakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi.

Upaya internal untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku juga terus ditingkatkan, peningkatan koordinasi dan komitmen antara seluruh pelaksana kegiatan sehingga rencana penarikan dana (RPD) dan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun sehingga capaian dan kinerja dapat lebih optimal. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dapat lebih dilakukan secara penuh perhitungan sehingga meminimalisir pengembalian belanja dengan tetap mengedepankan semangat efisiensi.

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan akan terus meningkatkan upaya-upaya pengendalian intern satker untuk mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, salah satunya melalui pelaksanaan penilaian oleh Tim PIPK yang telah berlangsung sejak tahun 2019, serta peran Tim SKI yang diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan terhadap tata kelola perencanaan penganggaran dan keuangan di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sampai target menjadi salah satu satker yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dapat tercapai.

**LAMPIRAN**  
**LAPORAN KINERJA PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN**  
**TAHUN 2021**

## AKREDITASI/ STANDAR KELAYAKAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI – ASSESSMENT CENTERPUSAT PELATIHAN SDM OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DENGAN KATEGORI A





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

# Sertifikat

## PENGAKUAN KELAYAKAN PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20/BKN/IX/2021

Tanggal 10 September 2021, menyatakan bahwa :

**Pusat Pelatihan SDM Kesehatan  
Kementerian Kesehatan RI**

Telah memenuhi kesesuaian Standar Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dengan Kategori

# A

Sertifikat ini berlaku mulai tanggal 10 September 2021 sampai dengan 9 September 2026

Pt. KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



BIMA HARIA WIBISANA

# PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN TAHUN 2021





LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT

Nomor : 1397/K.1/PPDP.09

diberikan kepada :

### **PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

sebagai Lembaga Pengakreditasi Program untuk Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan dibawah lingkungan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan serta Lembaga Pelatihan lainnya dengan masa berlaku 5 (lima) Tahun,

berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 314/K.1/PPDP.09/2021 tentang Penetapan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Terakreditasi.

Jakarta, 8 Juli 2021

KEPALA,

ADI SURYANTO





# RUMAH SAKIT DARURAT PENANGANAN COVID-19 WISMA ATLET KEMAYORAN

Nomor : SF.1/E.PL/1/XII/2021/Academy

## PENGHARGAAN

KEPADA :

# Pusat Pelatihan SDM

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

ATAS DUKUNGANNYA TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT DARURAT PENANGANAN COVID-19 WISMA ATLET KEMAYORAN

JAKARTA, 07 DESEMBER 2021

KOORDINATOR RS DARURAT PENANGANAN COVID-19  
WISMA ATLET KEMAYORAN

dr. Budiiman, Sp.BP-RE (K), M.A.R.S.  
Mayor Jenderal TNI

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes

Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

**drg. Arianti Anaya, MKM**  
NIP 196409241994032001

**Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes**  
NIP 196504181989032002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan	1. Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	123.418
		2. Jumlah NSPK terkait Pelatihan Bidang Kesehatan yang telah disusun	57

**Kegiatan**

1. Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

**Anggaran**

Rp 160.257.382.000,-

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua,



**drg. Arianti Anaya, MKM**  
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama



**Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes**  
NIP 196504181989032002

KEMENTERIAN KESEHATAN  
 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN  
 PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
 TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 04-01-2022  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : LBAPKS

NAMA UAKPB : 024.12.00.416227.000 PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	8,497,500	0	8,497,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
131111	Tanah	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	4,280,992,500	2,562,461,000	1,718,531,500
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software	716,815,000	457,710,000	259,105,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0
J U M L A H		5,006,305,000	3,020,171,000	1,986,134,000

Jakarta, 4 Januari 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

Dra. Oes Fatimah Rosyati, M.Kes  
 NIP 19650418198032002

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : 024.12.00.416227.000 PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

Tanggal : 04-01-2022  
Halaman : 1  
Kode Lap : LBAPKS

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	8,497,500	0	8,497,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
131111	Tanah	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	4,280,992,500	2,562,461,000	1,718,531,500
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software	716,815,000	457,710,000	259,105,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0
J U M L A H		5,006,305,000	3,020,171,000	1,986,134,000

Jakarta, 4 Januari 2022

Penanggung Jawab UAKPB  
Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

  
Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes  
NIP 19650418198032002

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : 024.12.00.416227.000 PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

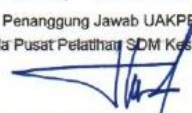
Tanggal : 04-01-2022  
Halaman : 1  
Kode Lap. : LBAPKS

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	8,497,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0
131111	Tanah	0
132111	Peralatan dan Mesin	4,280,992,500
133111	Gedung dan Bangunan	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	( 2,562,461,000)
162151	Software	716,815,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
169315	Akumulasi Amortisasi software	( 457,710,000)
J U M L A H		1,986,134,000

Jakarta, 4 Januari 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

  
Dra. Oos Fatimah Rosvafi, M. Kes

NIP 196504181989012002

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TAHUN ANGGARAN 2021


NAMA UAKPB : 024.12.00.416227.000 PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

Tanggal : 04-01-2022  
Halaman : 1  
Kode Lap : LBAPKS

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	8,497,500	0	8,497,500
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
131111	Tanah	0	0	0
132111	Peralatan dan Mesin	4,280,992,500	2,562,461,000	1,718,531,500
133111	Gedung dan Bangunan	0	0	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0
162151	Software	716,815,000	457,710,000	259,105,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	0	0	0
J U M L A H		5,006,305,000	3,020,171,000	1,986,134,000

Jakarta, 4 Januari 2022

Penanggung Jawab UAKPB  
Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

  
Dra. Oes Fatimah Rosyati M. Kes  
NIP 19650418198032002